

# **PROSPEK PIDANA KERJA SOSIAL DI INDONESIA**

**Oleh**

**Syauqi Aqiel Marzuqi**

**E1A018041**

## **ABSTRAK**

Perkembangan hukum pidana di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, hal ini dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat. Perkembangan ini mengharuskan adanya perkembangan-perkembangan hukum baru khususnya hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 merupakan hasil dari perkembangan hukum pidana yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini telah mengatur banyak hal baru, salah satunya berkaitan dengan perubahan parameter penjatuhan sanksi sebagai upaya penyelesaian pidana. Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis alternatif sanksi pidana yang diperkenalkan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prospek pidana kerja sosial dan alasan diaturnya pidana kerja sosial di dalam KUHP baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) alasan diaturnya pidana kerja sosial di dalam KUHP merupakan hasil dari adanya perubahan atau pergeseran sistem pidana dan pembedaan yang memperhatikan prinsip keseimbangan dan tujuan pembedaan. 2) Prospek pidana kerja sosial telah sesuai dengan tujuan dan fungsi yang dicita-citakan dalam KUHP yakni sebagai alternatif pidana penjara, adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana kerja sosial terletak pada SDM dan sarana prasarana Bapas Pekalongan yang kurang, belum adanya mekanisme peraturan pelaksanaan pidana kerja sosial, serta pandangan negatif masyarakat terhadap terpidana.

**Kata Kunci: Prospek, Sanksi, Pidana Kerja Sosial**

# **PROSPECTS OF COMMUNITY SERVICE ORDER IN INDONESIA**

*Oleh*

**Syauqi Aqiel Marzuqi**

**E1A018041**

## **ABSTRACT**

*The development of criminal law has undergone many changes, this is influenced by society. This development requires the development of new laws, especially criminal law. Criminal code number 1 of 2023 is the result of the development of criminal law which replaces the old criminal code. This Criminal Code has regulated many new things, one of which is related to changes in parameters for imposing sanctions as an effort to resolve criminal cases. Community service is one type of alternative criminal sanction that has been introduced. Therefore, the aim of this research is to find out the prospects for community service sentences and the reasons for regulating community service sentences in the new criminal code. The method used in this research is the empirical legal method. The results of the study showed that 1) the reason for regulating community service penalties in the criminal code is the result of changes or shifts in the criminal and sentencing system which consider the principle of balance and the objectives of sentencing. 2) The prospect of community service sentences is in accordance with the aims and functions aspired to in the criminal code namely as an alternative to imprisonment, The inhibiting factors in the implementation of community service sentences lies in poor human resources and inadequate Bapas Pekalongan infrastructure, the absence of a regulatory mechanism for implementing community service sentences, as well as negative views of society towards convicts.*

**Keywords: Prospect, Sanction, Community Service Order**